



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perubahan APBD adalah Perubahan pada rencana tahunan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga berupa Pendapatan, Pengeluaran dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.2.111.465.786.000,00 bertambah sebesar Rp.35.140.636.000,00 sehingga menjadi Rp.2.146.606.422.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| a. pendapatan daerah | |
| 1. semula | Rp. 2.096.465.786.000,00 |
| 2. berkurang | (Rp. <u>5.571.112.000,00</u>) |
| jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.090.894.674.000,00 |

b. belanja daerah	
1. semula	Rp. 2.110.403.286.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 35.134.185.000,00</u>
jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.145.537.471.000,00
c. pembiayaan daerah	
1. penerimaan pembiayaan	
1) semula	Rp. 15.000.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 40.705.297.000,00</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 55.705.297.000,00
2. pengeluaran pembiayaan	
1) semula	Rp. 1.062.500.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 1.062.500.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 54.642.797.000,00
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah	
1. semula	Rp. 400.401.594.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 36.012.739.000,00</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 436.414.333.000,00
b. pendapatan transfer	
1. semula	Rp. 1.682.609.692.000,00
2. berkurang	<u>(Rp. 41.583.851.000,00)</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.641.025.841.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1. semula	Rp. 13.454.500.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 13.454.500.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah:	
1. semula	Rp. 158.837.000.000,00
2. berkurang	<u>(Rp. 734.000.000,00)</u>
jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp. 158.103.000.000,00

b. retribusi daerah	
1. semula	Rp. 165.519.199.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 30.207.857.000,00</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 195.727.056.000,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) semula	Rp. 22.847.965.000,00
2) berkurang	<u>(Rp. 488.700.000,00)</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 22.359.265.000,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) semula	Rp. 53.197.430.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 7.027.582.000,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 60.225.012.000,00
(2) pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. transfer pemerintah pusat	
1) semula	Rp. 1.576.870.655.000,00
2) berkurang	<u>(Rp. 32.326.485.000,00)</u>
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 1.544.544.170.000,00
b. transfer antar daerah	
1) semula	Rp. 105.739.037.000,00
2) berkurang	<u>(Rp. 9.257.366.000,00)</u>
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 96.481.671.000,00
(3) lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a. pendapatan hibah	
1) semula	Rp. 13.454.500.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 13.454.500.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b,
terdiri atas:

a. belanja operasi;	
1) semula	Rp. 1.575.463.172.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 13.947.094.000,00</u>
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 1.589.410.266.000,00
b. belanja modal;	
1) semula	Rp. 118.716.328.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 27.389.132.000,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 146.105.460.000,00

c. belanja tidak terduga;	
1) semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,00
d. belanja transfer;	
1) semula	Rp. 414.223.786.000,00
2) berkurang	<u>(Rp. 6.202.041.000,00)</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 408.021.745.000,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai	
1) semula	Rp. 1.026.434.770.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 5.166.226.000,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 1.031.600.996.000,00
b. belanja barang dan jasa	
1) semula	Rp. 499.864.069.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 14.374.827.000,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 514.238.896.000,00
c. belanja subsidi	
1) semula	Rp. 31.875.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 31.875.000,00
d. belanja hibah	
1) semula	Rp. 43.205.258.000,00
2) berkurang	<u>(Rp. 4.879.959.000,00)</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 38.325.299.000,00
e. belanja bantuan sosial	
1) semula	Rp. 5.927.200.000,00
2) berkurang	<u>(Rp. 714.000.000,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 5.213.200.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal peralatan dan mesin	
1) semula	Rp. 49.225.470.000,00
2) berkurang	<u>(Rp. 1.025.896.000,00)</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 48.199.574.000,00

- | | |
|---|-------------------------------|
| b. belanja modal bangunan dan gedung | |
| 1) semula | Rp. 15.582.601.000,00 |
| 2) berkurang | <u>(Rp. 8.719.995.000,00)</u> |
| jumlah belanja modal | Rp. 6.862.606.000,00 |
| bangunan dan gedung setelah perubahan | |
| c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | |
| 1) semula | Rp. 47.948.821.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp. 31.686.270.000,00</u> |
| jumlah belanja modal jalan, | Rp. 79.635.091.000,00 |
| irigasi, dan jaringan setelah perubahan | |
| d. belanja modal aset tetap lainnya | |
| 1) semula | Rp. 5.459.436.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp. 5.248.753.000,00</u> |
| jumlah belanja aset | Rp. 10.708.189.000,00 |
| tetap lainnya setelah perubahan | |
| e. belanja modal aset lainnya | |
| 1) semula | Rp. 500.000.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp. 200.000.000,00</u> |
| jumlah belanja aset | Rp. 700.00.000,00 |
| lainnya setelah perubahan | |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas:
- | | |
|---|----------------------|
| belanja tidak terduga setelah perubahan | |
| 1) semula | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| jumlah belanja tidak terduga | Rp. 2.000.000.000,00 |
| setelah perubahan | |
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| a. belanja bagi hasil | |
| 1) semula | Rp. 17.285.068.000,00 |
| 2) berkurang | <u>(Rp. 6.570.229.000,00)</u> |
| jumlah belanja bagi hasil | Rp. 10.714.839.000,00 |
| setelah perubahan | |
| b. belanja bantuan keuangan | |
| 1) semula | Rp. 396.938.718.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp. 368.188.000,00</u> |
| jumlah belanja bantuan | Rp. 397.306.906.000,00 |
| keuangan setelah perubahan | |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| a. penerimaan pembiayaan | |
| 1) semula | Rp. 15.000.000.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp. 40.705.297.000,00</u> |
| jumlah penerimaan | Rp. 55.705.297.000,00 |
| setelah perubahan | |

b. pengeluaran pembiayaan		
1) semula	Rp.	1.062.500.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	1.062.500.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| 1) semula | Rp. | 15.000.000.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp.</u> | <u>40.711.748.000,00</u> |
| jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp. | 55.711.748.000,00 |
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. penyertaan modal daerah
- | | | |
|--|------------|------------------|
| 1) semula | Rp. | 1.062.500.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp. | 1.062.500.000,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

(1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;
17. Lampiran XVII Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Agustus 2025
BUPATI PURBALINGGA

ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,
PROVINSI JAWA TENGAH: (2-120/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN,S.H,M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007



KABUPATEN PURBALINGGA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja				Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/ Berkurang				
		Sebelum	Sesudah	Operasi		Modal					Tidak Terduga		Transfer	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	203.459.066.000	236.936.090.000	1.161.167.919.000	1.196.875.076.000	107.337.038.000	137.219.369.000	-	-	-	-	1.268.504.957.000	1.334.094.445.000	65.589.488.000
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	-	-	722.176.590.000	717.636.537.000	21.111.492.000	26.663.011.000	-	-	-	-	743.288.082.000	744.299.548.000	1.011.466.000
1 01 0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	694.394.448.000	689.605.413.000	11.720.934.000	16.751.616.000	-	-	-	-	706.115.382.000	706.357.029.000	241.647.000
1 01 1	TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA	-	-	118.480.000	118.480.000	45.120.000	45.120.000	-	-	-	-	163.600.000	163.600.000	-
1 01 2	TK NEGERI PEMBINA BOBOTSARI	-	-	85.828.000	79.675.000	42.372.000	48.525.000	-	-	-	-	128.200.000	128.200.000	-
1 01 3	TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI	-	-	108.404.000	100.446.000	39.596.000	47.554.000	-	-	-	-	148.000.000	148.000.000	-
1 01 4	TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA	-	-	81.211.000	67.089.000	51.189.000	65.311.000	-	-	-	-	132.400.000	132.400.000	-
1 01 0	SMP NEGERI 1 PURBALINGGA	-	-	816.147.000	833.998.000	199.753.000	216.902.000	-	-	-	-	1.015.900.000	1.050.900.000	35.000.000
1 01 1	SMP NEGERI 2 PURBALINGGA	-	-	753.839.000	722.282.000	174.061.000	207.812.000	-	-	-	-	927.900.000	930.094.000	2.194.000
1 01 2	SMP NEGERI 3 PURBALINGGA	-	-	797.680.000	773.717.000	109.320.000	187.691.000	-	-	-	-	907.000.000	961.408.000	54.408.000
1 01 3	SMP NEGERI 4 PURBALINGGA	-	-	681.360.000	696.835.000	209.140.000	228.665.000	-	-	-	-	890.500.000	925.500.000	35.000.000
1 01 4	SMP NEGERI 5 PURBALINGGA	-	-	712.483.000	721.462.000	253.917.000	244.938.000	-	-	-	-	966.400.000	966.400.000	-
1 01 5	SMP NEGERI 1 KALIMANAH	-	-	735.300.000	716.636.000	269.600.000	288.264.000	-	-	-	-	1.004.900.000	1.004.900.000	-
1 01 6	SMP NEGERI 2 KALIMANAH	-	-	633.144.000	680.756.000	276.356.000	228.744.000	-	-	-	-	909.500.000	909.500.000	-
1 01 7	SMP NEGERI 3 KALIMANAH	-	-	377.351.000	358.147.000	173.149.000	192.353.000	-	-	-	-	550.500.000	550.500.000	-
1 1	SMP NEGERI 1 PADAMARA	-	-	699.226.000	673.081.000	196.774.000	258.019.000	-	-	-	-	896.000.000	931.100.000	35.100.000
1 1	SMP NEGERI 2 PADAMARA	-	-	147.782.000	436.225.000	603.318.000	349.875.000	-	-	-	-	751.100.000	786.100.000	35.000.000
1 1	SMP NEGERI 1 KUTASARI	-	-	680.755.000	717.421.000	244.945.000	245.536.000	-	-	-	-	925.700.000	962.957.000	37.257.000
1 1	SMP NEGERI 2 KUTASARI	-	-	566.573.000	554.946.000	128.427.000	140.054.000	-	-	-	-	695.000.000	695.000.000	-
1 1	SMP NEGERI 3 KUTASARI	-	-	350.719.000	350.349.000	140.381.000	143.971.000	-	-	-	-	491.100.000	494.320.000	3.220.000
1 1	SMP NEGERI 4 KUTASARI	-	-	524.411.000	516.048.000	191.489.000	199.852.000	-	-	-	-	715.900.000	715.900.000	-
1 01 4	SMP NEGERI 1 KARANGREJA	-	-	579.880.000	599.099.000	177.520.000	193.985.000	-	-	-	-	757.400.000	793.084.000	35.684.000
1 01 5	SMP NEGERI 2 KARANGREJA	-	-	430.969.000	424.399.000	202.031.000	208.601.000	-	-	-	-	633.000.000	633.000.000	-
1 01 6	SMP NEGERI 3 KARANGREJA	-	-	376.550.000	361.516.000	106.850.000	121.884.000	-	-	-	-	483.400.000	483.400.000	-
1 01 7	SMP NEGERI 1 KARANGJAMBU	-	-	300.876.000	333.476.000	172.324.000	180.184.000	-	-	-	-	473.200.000	513.660.000	40.460.000
1 01 8	SMP NEGERI 2 KARANGJAMBU	-	-	151.918.000	145.915.000	57.782.000	63.789.000	-	-	-	-	209.700.000	209.704.000	4.000
1 01 9	SMP NEGERI 1 KEMANGKON	-	-	595.153.000	585.397.000	297.547.000	308.573.000	-	-	-	-	892.700.000	893.970.000	1.270.000
1 01 0	SMP NEGERI 2 KEMANGKON	-	-	334.131.000	345.381.000	164.869.000	188.619.000	-	-	-	-	499.000.000	534.000.000	35.000.000
1 01 1	SMP NEGERI 3 KEMANGKON	-	-	318.025.000	307.529.000	76.475.000	88.551.000	-	-	-	-	394.500.000	396.080.000	1.580.000
1 01 2	SMP NEGERI 4 KEMANGKON	-	-	318.480.000	287.927.000	57.320.000	87.873.000	-	-	-	-	375.800.000	375.800.000	-
1 1	SMP NEGERI 1 BUKATEJA	-	-	730.780.000	741.580.000	222.420.000	213.920.000	-	-	-	-	953.200.000	955.500.000	2.300.000
1 1	SMP NEGERI 2 BUKATEJA	-	-	653.569.000	683.867.000	264.731.000	234.433.000	-	-	-	-	918.300.000	918.300.000	-
1 1	SMP NEGERI 3 BUKATEJA	-	-	558.910.000	549.835.000	152.590.000	161.665.000	-	-	-	-	711.500.000	711.500.000	-
1 1	SMP NEGERI 1 KEJOBONG	-	-	634.215.000	669.481.000	183.685.000	183.419.000	-	-	-	-	817.900.000	852.900.000	35.000.000
1 1	SMP NEGERI 2 KEJOBONG	-	-	248.476.000	270.696.000	122.724.000	139.754.000	-	-	-	-	371.200.000	410.450.000	39.250.000
1 01 8	SMP NEGERI 1 KALIGONDANG	-	-	767.873.000	790.057.000	228.227.000	241.043.000	-	-	-	-	996.100.000	1.031.100.000	35.000.000
1 01 9	SMP NEGERI 2 KALIGONDANG	-	-	490.136.000	478.880.000	135.164.000	181.420.000	-	-	-	-	625.300.000	660.300.000	35.000.000
1 01 0	SMP NEGERI 1 PENGADegan	-	-	602.634.000	631.252.000	230.666.000	237.048.000	-	-	-	-	833.300.000	868.300.000	35.000.000
1 01 1	SMP NEGERI 2 PENGADegan	-	-	386.237.000	422.155.000	105.963.000	105.445.000	-	-	-	-	492.200.000	527.600.000	35.400.000
1 01 2	SMP NEGERI 3 PENGADegan	-	-	298.747.000	289.827.000	71.553.000	80.473.000	-	-	-	-	370.300.000	370.300.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja											
		Sebelum	Setelah	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	1.01.2.22.0.00.02.0053	SMP NEGERI 1 REMBANG	-	-	736.334.000	692.818.000	122.566.000	166.082.000	-	-	-	-	858.900.000	858.900.000	-
1	1.01.2.22.0.00.02.0054	SMP NEGERI 2 REMBANG	-	-	619.437.000	615.178.000	104.163.000	108.422.000	-	-	-	-	723.600.000	723.600.000	-
1	1.01.2.22.0.00.02.0055	SMP NEGERI 4 REMBANG	-	-	266.078.000	258.778.000	33.822.000	41.122.000	-	-	-	-	299.900.000	299.900.000	-
101	1.01.2.22.0.00.02.0056	SMP NEGERI 1 KARANGMONCOL	-	-	602.080.000	605.725.000	319.220.000	350.575.000	-	-	-	-	921.300.000	956.300.000	35.000.000
101	1.01.2.22.0.00.02.0057	SMP NEGERI 2 KARANGMONCOL	-	-	308.830.000	297.848.000	97.770.000	108.752.000	-	-	-	-	406.600.000	406.600.000	-
101	1.01.2.22.0.00.02.0058	SMP NEGERI 3 KARANGMONCOL	-	-	176.158.000	155.448.000	36.842.000	57.552.000	-	-	-	-	213.000.000	213.000.000	-
101	1.01.2.22.0.00.02.0059	SMP NEGERI 4 KARANGMONCOL	-	-	260.960.000	258.960.000	44.440.000	46.440.000	-	-	-	-	305.400.000	305.400.000	-
101	1.01.2.22.0.00.02.0060	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	-	-	670.915.000	657.976.000	223.985.000	276.380.000	-	-	-	-	894.900.000	934.356.000	39.456.000
101	1.01.2.22.0.00.02.0061	SMP NEGERI 1 KERTANEGARA	-	-	548.144.000	569.615.000	165.556.000	179.086.000	-	-	-	-	713.700.000	748.701.000	35.001.000
101	1.01.2.22.0.00.02.0062	SMP NEGERI 2 KERTANEGARA	-	-	298.566.000	300.421.000	117.734.000	115.879.000	-	-	-	-	416.300.000	416.300.000	-
101	1.01.2.22.0.00.02.0063	SMP NEGERI 1 BOJONGSARI	-	-	635.765.000	644.765.000	364.735.000	367.855.000	-	-	-	-	1.000.500.000	1.012.620.000	12.120.000
101	1.01.2.22.0.00.02.0064	SMP NEGERI 2 BOJONGSARI	-	-	623.140.000	620.210.000	181.860.000	184.790.000	-	-	-	-	805.000.000	805.000.000	-
1	1.01.2.22.0.00.02.0065	SMP NEGERI 1 MRBET	-	-	643.430.000	649.190.000	248.170.000	252.410.000	-	-	-	-	891.600.000	901.600.000	10.000.000
1	1.01.2.22.0.00.02.0066	SMP NEGERI 2 MRBET	-	-	487.541.000	482.891.000	211.859.000	216.509.000	-	-	-	-	699.400.000	699.400.000	-
1	1.01.2.22.0.00.02.0067	SMP NEGERI 3 MRBET	-	-	385.350.000	371.566.000	99.150.000	112.934.000	-	-	-	-	484.500.000	484.500.000	-
1	1.01.2.22.0.00.02.0068	SMP NEGERI 4 MRBET	-	-	316.729.000	299.741.000	79.771.000	96.759.000	-	-	-	-	396.500.000	396.500.000	-
1	1.01.2.22.0.00.02.0069	SMP NEGERI 5 MRBET	-	-	414.770.000	449.011.000	139.030.000	139.904.000	-	-	-	-	553.800.000	588.915.000	35.115.000
101	1.01.2.22.0.00.02.0070	SMP NEGERI 1 BOBOTSARI	-	-	748.843.000	748.322.000	149.357.000	149.878.000	-	-	-	-	898.200.000	898.200.000	-
101	1.01.2.22.0.00.02.0071	SMP NEGERI 2 BOBOTSARI	-	-	676.036.000	619.743.000	138.864.000	195.157.000	-	-	-	-	814.900.000	814.900.000	-
101	1.01.2.22.0.00.02.0072	SMP NEGERI 3 BOBOTSARI	-	-	511.720.000	497.128.000	37.680.000	87.272.000	-	-	-	-	549.400.000	584.400.000	35.000.000
101	1.01.2.22.0.00.02.0073	SMP NEGERI 4 BOBOTSARI	-	-	203.064.000	199.928.000	94.636.000	97.772.000	-	-	-	-	297.700.000	297.700.000	-
102		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	200.931.786.000	234.408.810.000	379.736.635.000	424.526.156.000	29.167.028.000	28.052.358.000	-	-	-	-	408.903.663.000	452.578.514.000	43.674.851.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	-	-	164.806.294.000	162.827.192.000	3.444.697.000	3.478.582.000	-	-	-	-	168.250.991.000	166.305.774.000	-1.945.217.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD LABKES	900.000.000	1.100.000.000	882.290.000	1.165.424.000	17.710.000	-	-	-	-	900.000.000	1.165.424.000	265.424.000	
102	1.02.0.00.0.00.01.0010	PUSKESMAS PURBALINGGA	1.900.000.000	2.042.800.000	2.983.849.000	3.442.210.000	81.541.000	171.645.000	-	-	-	-	3.065.390.000	3.613.855.000	548.465.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0011	PUSKESMAS BOJONG	1.061.600.000	1.082.550.000	1.997.167.000	2.071.125.000	1.850.000	22.490.000	-	-	-	-	1.999.017.000	2.093.615.000	94.598.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0012	PUSKESMAS KUTASARI	4.032.790.000	4.032.790.000	5.044.797.000	5.287.208.000	74.900.000	121.450.000	-	-	-	-	5.119.697.000	5.408.658.000	288.961.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0013	PUSKESMAS BOJONGSARI	3.300.000.000	3.300.000.000	4.194.204.000	4.624.896.000	60.770.000	72.770.000	-	-	-	-	4.254.974.000	4.697.666.000	442.692.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0014	PUSKESMAS KALIMANAH	2.768.590.000	3.008.590.000	4.216.004.000	4.779.555.000	86.116.000	153.116.000	-	-	-	-	4.302.120.000	4.932.671.000	630.551.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0015	PUSKESMAS PADAMARA	3.205.240.000	3.205.240.000	4.340.896.000	4.701.420.000	31.580.000	95.702.000	-	-	-	-	4.372.476.000	4.797.122.000	424.646.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0016	PUSKESMAS KEMANGKON	3.724.860.000	3.724.860.000	4.767.008.000	4.953.984.000	95.500.000	118.500.000	-	-	-	-	4.862.508.000	5.072.484.000	209.976.000
102	1.02.0.00.0.00.01.0017	PUSKESMAS KALIGONDANG	2.947.675.000	2.947.675.000	4.020.665.000	4.291.309.000	46.520.000	50.204.000	-	-	-	-	4.067.185.000	4.341.513.000	274.328.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0018	PUSKESMAS KALIKAJAR	1.440.000.000	1.470.000.000	2.596.476.000	2.831.792.000	15.030.000	50.879.000	-	-	-	-	2.611.506.000	2.882.671.000	271.165.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0019	PUSKESMAS KEJOBONG	4.543.800.000	4.613.955.000	5.220.103.000	5.611.094.000	419.000.000	436.900.000	-	-	-	-	5.639.103.000	6.047.994.000	408.891.000
102	1.02.0.00.0.00.01.0020	PUSKESMAS PENGADEGAN	3.155.600.000	3.155.600.000	3.969.299.000	4.212.164.000	53.490.000	68.883.000	-	-	-	-	4.022.789.000	4.281.047.000	258.258.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0021	PUSKESMAS BUKATEJA	3.062.800.000	3.062.800.000	3.921.140.000	4.558.536.000	35.000.000	50.000.000	-	-	-	-	3.956.140.000	4.608.536.000	652.396.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0022	PUSKESMAS KUTAWIS	1.890.947.000	2.114.260.000	3.003.387.000	3.658.406.000	-	82.184.000	-	-	-	-	3.003.387.000	3.740.590.000	737.203.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0023	PUSKESMAS REMBANG	5.400.000.000	5.406.000.000	5.956.305.000	6.370.081.000	441.310.000	441.310.000	-	-	-	-	6.397.615.000	6.811.391.000	413.776.000
102	1.02.0.00.0.00.01.0024	PUSKESMAS KARANGANYAR	3.553.194.000	3.803.194.000	4.151.576.000	4.966.681.000	113.210.000	120.385.000	-	-	-	-	4.264.786.000	5.087.066.000	822.280.000
102	1.02.0.00.0.00.01.0025	PUSKESMAS KARANGMONCOL	4.200.000.000	4.672.100.000	5.158.021.000	6.081.376.000	131.000.000	139.050.000	-	-	-	-	5.289.021.000	6.220.426.000	931.405.000
102	1.02.0.00.0.00.01.0026	PUSKESMAS KARANGTENGAH	2.615.130.000	2.615.130.000	3.447.853.000	3.642.432.000	12.850.000	130.850.000	-	-	-	-	3.460.703.000	3.773.282.000	312.579.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0027	PUSKESMAS BOBOTSARI	4.129.496.000	4.718.000.000	5.016.906.000	6.009.320.000	44.534.000	497.754.000	-	-	-	-	5.061.440.000	6.507.074.000	1.445.634.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0028	PUSKESMAS MRBET	2.421.878.000	2.621.878.000	3.231.510.000	3.699.101.000	11.380.000	42.840.000	-	-	-	-	3.242.890.000	3.741.941.000	499.051.000
102	1.02.0.00.0.00.01.0029	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN	2.684.483.000	2.962.822.000	3.469.016.000	4.058.590.000	231.667.000	195.760.000	-	-	-	-	3.700.683.000	4.254.350.000	553.667.000
102	1.02.0.00.0.00.01.0030	PUSKESMAS KARANGREJA	3.900.400.000	4.100.400.000	4.574.138.000	5.266.429.000	68.754.000	81.754.000	-	-	-	-	4.642.892.000	5.348.183.000	705.291.000
102	1.02.0.00.0.00.01.0031	PUSKESMAS KARANGJAMBU	2.093.303.000	2.343.762.000	3.043.134.000	3.605.672.000	7.720.000	65.393.000	-	-	-	-	3.050.854.000	3.671.065.000	620.211.000
102	1.02.0.00.0.00.01.0101	RSUD GOETENG TAROENADIBRATA	100.000.000.000	125.000.000.000	95.283.844.000	124.497.989.000	4.716.156.000	3.402.866.000	-	-	-	-	100.000.000.000	127.900.855.000	27.900.855.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0102	RSUD PANTI NUGROHO	32.000.000.000	37.304.404.000	30.440.753.000	37.312.170.000	18.924.743.000	17.961.091.000	-	-	-	-	49.365.496.000	55.273.261.000	5.907.765.000
103		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.395.880.000	1.395.880.000	22.667.122.000	20.147.442.000	56.432.290.000	82.172.955.000	-	-	-	-	79.099.412.000	102.320.397.000	23.220.985.000
103	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.395.880.000	1.395.880.000	22.667.122.000	20.147.442.000	56.432.290.000	82.172.955.000	-	-	-	-	79.099.412.000	102.320.397.000	23.220.985.000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
104	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.131.400.000	1.131.400.000	8.534.027.000	7.365.309.000	2.020.000	-	-	-	-	-	-	-	8.536.047.000	7.365.309.000	- 1.170.738.000
104	1.04.1.03.2.10.02.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	1.198.470.000	703.005.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.198.470.000	703.005.000	- 495.465.000
104	1.04.1.03.2.10.02.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.131.400.000	1.131.400.000	7.335.557.000	6.662.304.000	2.020.000	-	-	-	-	-	-	-	7.337.577.000	6.662.304.000	- 675.273.000
105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	12.070.727.000	11.469.528.000	591.208.000	274.965.000	-	-	-	-	-	-	12.661.935.000	11.744.493.000	- 917.442.000
105	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	8.426.031.000	8.034.966.000	550.116.000	236.373.000	-	-	-	-	-	-	8.976.147.000	8.271.339.000	- 704.808.000
105	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	3.644.696.000	3.434.562.000	41.092.000	38.592.000	-	-	-	-	-	-	3.685.788.000	3.473.154.000	- 212.634.000
106	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	-	-	15.982.818.000	15.730.104.000	33.000.000	56.080.000	-	-	-	-	-	-	16.015.818.000	15.786.184.000	- 229.634.000
106	1.06.2.14.2.08.06.0000 DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	15.982.818.000	15.730.104.000	33.000.000	56.080.000	-	-	-	-	-	-	16.015.818.000	15.786.184.000	- 229.634.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.446.940.000	4.018.426.000	116.962.201.000	112.929.905.000	1.963.367.000	1.659.088.000	-	-	-	-	-	-	118.925.568.000	114.588.993.000	- 4.336.575.000
201	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	-	-	2.350.657.000	1.851.640.000	-	27.063.000	-	-	-	-	-	-	2.350.657.000	1.878.703.000	- 471.954.000
201	1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	2.350.657.000	1.851.640.000	-	27.063.000	-	-	-	-	-	-	2.350.657.000	1.878.703.000	- 471.954.000
204	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	-	-	249.494.000	479.157.000	-	-	-	-	-	-	-	-	249.494.000	479.157.000	229.663.000
204	1.04.1.03.2.10.02.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	249.494.000	479.157.000	-	-	-	-	-	-	-	-	249.494.000	479.157.000	229.663.000
206	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	14.340.840.000	14.007.699.000	-	-	-	-	-	-	-	-	14.340.840.000	14.007.699.000	- 333.141.000
206	1.06.2.14.2.08.06.0000 DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	13.391.701.000	13.156.512.000	-	-	-	-	-	-	-	-	13.391.701.000	13.156.512.000	- 235.189.000
206	1.06.2.14.2.08.06.0000 DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	949.139.000	851.187.000	-	-	-	-	-	-	-	-	949.139.000	851.187.000	- 97.952.000
207	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	193.800.000	200.000.000	6.787.351.000	6.697.747.000	600.000	600.000	-	-	-	-	-	-	6.787.951.000	6.698.347.000	- 89.604.000
7	2.07.3.32.0.00.02.0000 DINAS TENAGA KERJA	193.800.000	200.000.000	6.787.351.000	6.697.747.000	600.000	600.000	-	-	-	-	-	-	6.787.951.000	6.698.347.000	- 89.604.000
209	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	206.900.000	206.900.000	5.812.144.000	5.184.073.000	9.690.000	7.130.000	-	-	-	-	-	-	5.821.834.000	5.191.203.000	- 630.631.000
209	2.09.3.25.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	206.900.000	206.900.000	5.812.144.000	5.184.073.000	9.690.000	7.130.000	-	-	-	-	-	-	5.821.834.000	5.191.203.000	- 630.631.000
211	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	900.000.000	1.306.000.000	17.355.330.000	17.112.157.000	115.540.000	460.707.000	-	-	-	-	-	-	17.470.870.000	17.572.864.000	101.994.000
211	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	900.000.000	1.306.000.000	17.355.330.000	17.112.157.000	115.540.000	460.707.000	-	-	-	-	-	-	17.470.870.000	17.572.864.000	101.994.000
212	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	6.541.323.000	6.178.745.000	89.851.000	281.692.000	-	-	-	-	-	-	6.631.174.000	6.460.437.000	- 170.737.000
212	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	6.541.323.000	6.178.745.000	89.851.000	281.692.000	-	-	-	-	-	-	6.631.174.000	6.460.437.000	- 170.737.000
213	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	8.256.704.000	9.681.871.000	2.000.000	6.000.000	-	-	-	-	-	-	8.258.704.000	9.687.871.000	1.429.167.000
213	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	8.256.704.000	9.681.871.000	2.000.000	6.000.000	-	-	-	-	-	-	8.258.704.000	9.687.871.000	1.429.167.000
215	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.836.000.000	1.875.456.000	19.158.162.000	19.753.908.000	1.052.134.000	262.554.000	-	-	-	-	-	-	20.210.296.000	20.016.462.000	- 193.834.000
15	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	1.836.000.000	1.875.456.000	19.158.162.000	19.753.908.000	1.052.134.000	262.554.000	-	-	-	-	-	-	20.210.296.000	20.016.462.000	- 193.834.000
216	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	8.149.796.000	7.700.916.000	395.970.000	401.310.000	-	-	-	-	-	-	8.545.766.000	8.102.226.000	- 443.540.000
216	2.16.2.20.2.21.03.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	8.024.580.000	7.622.234.000	395.970.000	401.310.000	-	-	-	-	-	-	8.420.550.000	8.023.544.000	- 397.006.000
216	2.16.2.20.2.21.03.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	76.068.000	47.223.000	-	-	-	-	-	-	-	-	76.068.000	47.223.000	- 28.845.000
216	2.16.2.20.2.21.03.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	49.148.000	31.459.000	-	-	-	-	-	-	-	-	49.148.000	31.459.000	- 17.689.000
217	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	-	-	7.834.880.000	6.337.632.000	-	17.250.000	-	-	-	-	-	-	7.834.880.000	6.354.882.000	- 1.479.998.000
217	2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	7.834.880.000	6.337.632.000	-	17.250.000	-	-	-	-	-	-	7.834.880.000	6.354.882.000	- 1.479.998.000
218	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	-	-	4.192.061.000	4.229.482.000	25.700.000	25.700.000	-	-	-	-	-	-	4.217.761.000	4.255.182.000	37.421.000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja								Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum	Sesudah	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer					
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
218	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	4.192.061.000	4.229.482.000	25.700.000	25.700.000	-	-	-	-	4.217.761.000	4.255.182.000	37.421.000
219	2.19.3.26.0.00.02.0000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	310.240.000	430.070.000	11.496.933.000	9.708.414.000	251.882.000	149.082.000	-	-	-	-	11.748.815.000	9.857.496.000	- 1.891.319.000
219	2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS PEMUDA, OLARHAGA DAN PARIWISATA	310.240.000	430.070.000	11.496.933.000	9.708.414.000	251.882.000	149.082.000	-	-	-	-	11.748.815.000	9.857.496.000	- 1.891.319.000
224	2.24.2.23.0.00.02.0000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	-	-	4.436.526.000	4.006.464.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	4.456.526.000	4.026.464.000	- 430.062.000
224	2.24.2.23.0.00.02.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	4.354.090.000	3.953.290.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	4.374.090.000	3.973.290.000	- 400.800.000
224	2.24.2.23.0.00.02.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	82.436.000	53.174.000	-	-	-	-	-	-	82.436.000	53.174.000	- 29.262.000
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8.094.456.000	8.017.042.000	64.771.237.000	62.728.490.000	410.738.000	458.547.000	-	-	-	-	65.181.975.000	63.187.037.000	- 1.994.938.000
307		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	-	11.200.000	-	-	-	-	-	-	-	11.200.000	-	11.200.000
7	2.07.3.32.0.00.02.0000	DINAS TENAGA KERJA	-	-	11.200.000	-	-	-	-	-	-	-	11.200.000	-	11.200.000
309		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	807.384.000	667.416.000	-	-	-	-	-	-	807.384.000	667.416.000	- 139.968.000
309	2.09.3.25.0.00.02.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	-	-	807.384.000	667.416.000	-	-	-	-	-	-	807.384.000	667.416.000	- 139.968.000
319		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	-	-	682.435.000	597.206.000	1.190.000	1.737.000	-	-	-	-	683.625.000	598.943.000	- 84.682.000
319	2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS PEMUDA, OLARHAGA DAN PARIWISATA	-	-	682.435.000	597.206.000	1.190.000	1.737.000	-	-	-	-	683.625.000	598.943.000	- 84.682.000
327		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	601.420.000	601.420.000	46.301.642.000	46.019.527.000	3.065.000	3.065.000	-	-	-	-	46.304.707.000	46.022.592.000	- 282.115.000
27	3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	601.420.000	601.420.000	46.301.642.000	46.019.527.000	3.065.000	3.065.000	-	-	-	-	46.304.707.000	46.022.592.000	- 282.115.000
331		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.493.036.000	7.415.622.000	16.968.576.000	15.444.341.000	406.483.000	453.745.000	-	-	-	-	17.375.059.000	15.898.086.000	- 1.476.973.000
331	3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	4.322.670.000	3.217.696.000	401.130.000	448.392.000	-	-	-	-	4.723.800.000	3.666.088.000	- 1.057.712.000
331	3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.493.036.000	7.415.622.000	12.645.906.000	12.226.645.000	5.353.000	5.353.000	-	-	-	-	12.651.259.000	12.231.998.000	- 419.261.000
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	119.118.978.000	117.421.100.000	4.097.710.000	4.711.787.000	-	-	-	-	123.216.688.000	122.132.887.000	- 1.083.801.000
1		SEKRETARIAT DAERAH	-	-	59.793.780.000	51.457.137.000	3.295.210.000	3.893.187.000	-	-	-	-	63.088.990.000	55.350.324.000	- 7.738.666.000
1	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	20.714.254.000	19.742.950.000	-	-	-	-	-	-	20.714.254.000	19.742.950.000	- 971.304.000
1	4.01.0.00.0.00.01.0001	BAGIAN UMUM	-	-	18.598.933.000	17.306.082.000	3.185.940.000	3.752.400.000	-	-	-	-	21.784.873.000	21.058.482.000	- 726.391.000
1	4.01.0.00.0.00.01.0004	BAGIAN ORGANISASI	-	-	192.860.000	111.471.000	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	292.860.000	211.471.000	- 81.389.000
1	4.01.0.00.0.00.01.0005	BAGIAN HUKUM	-	-	450.151.000	240.347.000	9.270.000	40.787.000	-	-	-	-	459.421.000	281.134.000	- 178.287.000
1	4.01.0.00.0.00.01.0006	BAGIAN PEMERINTAHAN	-	-	422.370.000	224.766.000	-	-	-	-	-	-	422.370.000	224.766.000	- 197.604.000
401	4.01.0.00.0.00.01.0007	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	-	-	794.946.000	912.958.000	-	-	-	-	-	-	794.946.000	912.958.000	118.012.000
401	4.01.0.00.0.00.01.0008	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	16.996.824.000	11.935.674.000	-	-	-	-	-	-	16.996.824.000	11.935.674.000	- 5.061.150.000
401	4.01.0.00.0.00.01.0009	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-	318.834.000	79.120.000	-	-	-	-	-	-	318.834.000	79.120.000	- 239.714.000
401	4.01.0.00.0.00.01.0010	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	492.643.000	377.481.000	-	-	-	-	-	-	492.643.000	377.481.000	- 115.162.000
401	4.01.0.00.0.00.01.0011	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	-	-	811.965.000	526.288.000	-	-	-	-	-	-	811.965.000	526.288.000	- 285.677.000
2		SEKRETARIAT DPRD	-	-	59.325.198.000	65.963.963.000	802.500.000	818.600.000	-	-	-	-	60.127.698.000	66.782.563.000	6.654.865.000
2	4.02.0.00.0.00.02.0000	SEKRETARIAT DPRD	-	-	59.325.198.000	65.963.963.000	802.500.000	818.600.000	-	-	-	-	60.127.698.000	66.782.563.000	6.654.865.000
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.881.465.324.000	1.841.923.116.000	34.375.842.000	33.327.325.000	140.850.000	160.700.000	2.000.000.000	2.000.000.000	414.223.786.000	408.021.745.000	450.740.478.000	443.509.770.000	- 7.230.708.000
501		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	7.244.831.000	6.365.958.000	-	13.000.000	-	-	-	-	7.244.831.000	6.378.958.000	- 865.873.000
501	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	474.913.000	132.660.000	-	-	-	-	-	-	474.913.000	132.660.000	- 342.253.000
501	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	6.769.918.000	6.233.298.000	-	13.000.000	-	-	-	-	6.769.918.000	6.246.298.000	- 523.620.000
502		KEUANGAN	1.881.465.324.000	1.841.923.116.000	19.810.809.000	20.020.478.000	140.850.000	140.850.000	2.000.000.000	2.000.000.000	414.223.786.000	408.021.745.000	436.175.445.000	430.183.073.000	- 5.992.372.000
502	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEUANGAN DAERAH	1.881.465.324.000	1.841.923.116.000	19.810.809.000	20.020.478.000	140.850.000	140.850.000	2.000.000.000	2.000.000.000	414.223.786.000	408.021.745.000	436.175.445.000	430.183.073.000	- 5.992.372.000
3		KEPEGAWAIAN	-	-	7.320.202.000	6.940.889.000	-	6.850.000	-	-	-	-	7.320.202.000	6.947.739.000	- 372.463.000
503	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	7.265.202.000	6.902.459.000	-	6.850.000	-	-	-	-	7.265.202.000	6.909.309.000	- 355.893.000
503	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	55.000.000	38.430.000	-	-	-	-	-	-	55.000.000	38.430.000	- 16.570.000
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	18.341.291.000	10.974.657.000	4.392.924.000	1.466.323.000	-	-	-	-	22.734.215.000	12.440.980.000	- 10.293.235.000
1		INSPEKTORAT DAERAH	-	-	18.341.291.000	10.974.657.000	4.392.924.000	1.466.323.000	-	-	-	-	22.734.215.000	12.440.980.000	- 10.293.235.000
1	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	18.341.291.000	10.974.657.000	4.392.924.000	1.466.323.000	-	-	-	-	22.734.215.000	12.440.980.000	- 10.293.235.000
1		UNSUR KEWILAYAHAN	-	-	52.564.093.000	48.542.903.000	326.981.000	382.926.000	-	-	-	-	52.891.074.000	48.925.829.000	- 3.965.245.000
1		KECAMATAN	-	-	52.564.093.000	48.542.903.000	326.981.000	382.926.000	-	-	-	-	52.891.074.000	48.925.829.000	- 3.965.245.000
1	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN KEMANGKON	-	-	1.581.878.000	1.460.275.000	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	1.606.878.000	1.485.275.000	- 121.603.000
1	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN BUKATEJA	-	-	2.216.511.000	1.938.158.000	5.000.000	54.110.000	-	-	-	-	2.221.511.000	1.992.268.000	- 229.243.000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja								Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/ Berkurang			
		Sebelum	Sesudah	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer							
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN KEJOBONG	-	-	1.769.915.000	1.553.626.000	60.000.000	60.000.000	-	-	-	-	1.829.915.000	1.613.626.000	-	216.289.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN KALIGONDANG	-	-	1.784.030.000	1.717.757.000	33.500.000	29.000.000	-	-	-	-	1.817.530.000	1.746.757.000	-	70.773.000
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN PURBALINGGA	-	-	11.022.491.000	10.028.954.000	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	11.026.491.000	10.032.954.000	-	993.537.000
1	7.01.0.00.0.00.05.0001	KELURAHAN BOJONG	-	-	407.508.000	389.214.000	-	-	-	-	-	-	407.508.000	389.214.000	-	18.294.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0002	KELURAHAN KEDUNGMENJANGAN	-	-	389.939.000	372.864.000	7.745.000	7.745.000	-	-	-	-	397.684.000	380.609.000	-	17.075.000
1	7.01.0.00.0.00.05.0003	KELURAHAN BANCAR	-	-	405.474.000	479.283.000	-	-	-	-	-	-	405.474.000	479.283.000	-	73.809.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0004	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN	-	-	425.824.000	404.044.000	-	-	-	-	-	425.824.000	404.044.000	-	21.780.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0005	KELURAHAN PURBALINGGA KULON	-	-	618.194.000	593.006.000	3.930.000	3.930.000	-	-	-	622.124.000	596.936.000	-	25.188.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0006	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL	-	-	445.256.000	421.520.000	16.270.000	16.270.000	-	-	-	461.526.000	437.790.000	-	23.736.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0007	KELURAHAN PURBALINGGA LOR	-	-	414.830.000	382.555.000	-	-	-	-	-	414.830.000	382.555.000	-	32.275.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0008	KELURAHAN PENAMBONGAN	-	-	633.400.000	612.944.000	4.803.000	4.803.000	-	-	-	638.203.000	617.747.000	-	20.456.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0009	KELURAHAN KANDANGGAMPANG	-	-	402.899.000	382.561.000	7.000.000	7.000.000	-	-	-	409.899.000	389.561.000	-	20.338.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0010	KELURAHAN KEMBARAN KULON	-	-	411.794.000	392.564.000	-	-	-	-	-	411.794.000	392.564.000	-	19.230.000	
1	7.01.0.00.0.00.05.0011	KELURAHAN WIRASANA	-	-	445.826.000	415.769.000	-	-	-	-	-	-	445.826.000	415.769.000	-	30.057.000	
1	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KALIMANAH	-	-	4.040.825.000	3.934.599.000	14.000.000	14.000.000	-	-	-	-	4.054.825.000	3.948.599.000	-	106.226.000	
1	7.01.0.00.0.00.06.0001	KELURAHAN MEWEK	-	-	414.161.000	394.905.000	500.000	500.000	-	-	-	-	414.661.000	395.405.000	-	19.256.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0002	KELURAHAN KARANGMANYAR	-	-	418.038.000	409.373.000	10.618.000	10.618.000	-	-	-	428.656.000	419.991.000	-	8.665.000	
1	7.01.0.00.0.00.06.0003	KELURAHAN KALIKABONG	-	-	409.252.000	392.337.000	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	411.052.000	394.137.000	-	16.915.000	
1	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN KUTASARI	-	-	1.832.791.000	1.724.654.000	-	2.100.000	-	-	-	-	1.832.791.000	1.726.754.000	-	106.037.000	
1	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN MREBET	-	-	2.177.311.000	2.025.671.000	5.600.000	5.600.000	-	-	-	-	2.182.911.000	2.031.271.000	-	151.640.000	
1	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN BOBOTSARI	-	-	1.739.994.000	1.601.311.000	-	-	-	-	-	-	1.739.994.000	1.601.311.000	-	138.683.000	
1	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN KARANGREJA	-	-	1.793.461.000	1.676.739.000	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	1.818.461.000	1.701.739.000	-	116.722.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN KARANGANYAR	-	-	1.748.184.000	1.465.050.000	2.500.000	2.500.000	-	-	-	1.750.684.000	1.467.550.000	-	283.134.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN KARANGMONCOL	-	-	1.796.354.000	1.628.131.000	16.877.000	27.112.000	-	-	-	1.813.231.000	1.655.243.000	-	157.988.000	
1	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN REMBANG	-	-	2.030.313.000	1.883.633.000	10.630.000	10.630.000	-	-	-	-	2.040.943.000	1.894.263.000	-	146.680.000	
1	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN BOJONGSARI	-	-	1.996.605.000	1.759.435.000	1.000.000	-	-	-	-	-	1.997.605.000	1.759.435.000	-	238.170.000	
1	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN PADAMARA	-	-	2.584.045.000	2.454.854.000	-	-	-	-	-	-	2.584.045.000	2.454.854.000	-	129.191.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.1501	KELURAHAN KARANGSENTUL	-	-	356.032.000	337.859.000	40.000.000	40.000.000	-	-	-	396.032.000	377.859.000	-	18.173.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN PENGADEGAN	-	-	2.111.550.000	2.014.500.000	20.700.000	20.700.000	-	-	-	2.132.250.000	2.035.200.000	-	97.050.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN KARANGJAMBU	-	-	1.923.999.000	1.856.901.000	-	-	-	-	-	1.923.999.000	1.856.901.000	-	67.098.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN KERTANEGARA	-	-	1.815.409.000	1.437.857.000	10.508.000	10.508.000	-	-	-	1.825.917.000	1.448.365.000	-	377.552.000	
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	-	-	8.161.611.000	6.610.810.000	46.720.000	46.720.000	-	-	-	-	8.208.331.000	6.657.530.000	-	1.550.801.000	
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	8.161.611.000	6.610.810.000	46.720.000	46.720.000	-	-	-	-	8.208.331.000	6.657.530.000	-	1.550.801.000	
8	01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	8.161.611.000	6.610.810.000	46.720.000	46.720.000	-	-	-	-	8.208.331.000	6.657.530.000	-	1.550.801.000	
		TOTAL	2.096.465.786.000	2.090.894.674.000	1.575.463.172.000	1.589.410.266.000	118.716.328.000	146.105.460.000	2.000.000.000	2.000.000.000	414.223.786.000	408.021.745.000	2.110.403.286.000	2.145.537.471.000	35.134.185.000		

BUPATI PURBALINGGA

ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 14 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH (2-120/2025)